#### **BAB II**

#### SEJARAH RESOLUSI JIHAD 1945

# A. Latar Belakang Munculnya Resolusi Jihad

Jihad selalu menyita perhatian dari berbagai kalangan, baik dari Islam sendiri maupun non muslim. Bagi kalangan Islam, ajaran Jihad merupakan suatu yang inheren, sehingga setiap muslim secara otomatis adalah mujthahid.<sup>28</sup> Menurut sebagian ulama fiqh bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (*Bughat*).<sup>29</sup>

Peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merupakan sejarah panjang yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Berangkat dari pengalaman kelembagaan pesantren yang lama dipimpinnya, ulama hanya memiliki makna lawannya adalah imperealis Barat, yakni kerajaan Protestan Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, fokus perhatiannya dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dengan angkat senjata dalam organisasi kesenjataan, baik dalam Laskar Hizboellah, Sabilillah bersama BKR, TKR, TRI, TNI, selama perang kemerdekaan 1365-1369 H/ 1945-1950 M, melawan Tentara Sekutu Inggris dan NICA.<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gugun El-Guyananie, *Resolusi Jihad Paling Syar'I* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 56.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah*, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 248.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Suryanegara, API Sejarah 2, 201.

Pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mereka culik ke Rengasdengklok, Karawang, Motif penculikan adalah untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh atau tekanan Jepang. Kalangan politisi di Jakarta kemudian mengutus Ahmad Subardjo untuk menyusulnya sambil berusaha mencari titik temu dengan para pemuda tersebut sehingga pada tanggal 16 agustus 1945 keduanya berhasil dibawa kembali. Begitu sampai di Jakarta segera berkumpul para tokoh politik dan perwakilan pemuda untuk mendiskusikan kemerdekaan pada dirumah seorang perwira penghubung Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Imam Bonjol no. 1 Menteng. Rapat menyepakati segera mengumumkan kemerdekaan pada esok hari. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada pukul 10.00 di rumah Soekarno yang terletak di Pegangsaan Timur no. 56.32

Setelah berita proklamasi sampai ke kota-kota lain di Jawa melalui siaran radio seperti yang dilakukan oleh pemancar Radio Malabar dan *Bandoeng Hoso Kyoku* di Bandung, proklamasi kemerdekaan ini sampai ke Baghdad, Irak. Sementara di kota Surabaya, Jawa Timur, berita tentang proklamasi diterima pada tengah hari tanggal 17 Agustus 1945 dan menjelang malam hari seluruh penduduk Surabaya telah mengetahui mengenai berita proklamasi tersebut.<sup>33</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cindy Adam, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 303.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Zainul Milal Bilawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakan Indonesia* 1945-1949 (Tanggerang: Pustaka Compass, 2014), 170.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> William H. Frederik, *Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 234.

Informasi proklamasi kemerdekaan ini semakin meluas jangkauannya karena Kantor Berita Antara menyiarkan melalui radio sehingga mendapatkan tanggapan dari Australia dan San Fransisco , Amerika Serikat.<sup>34</sup> Jepang sebelumnya begitu marah atas tersebarnya berita mengenai kemerdekaan ini sehingga mereka menuntut pertanggungjawaban dari awak Kantor Berita *Domei* dan *Antara*, namun oleh pihak yang terakhir dengan cerdik membenturkan tuntutan ini dengan pihak Kampetai yang mengurusi penuntutan itu dengan pihak *Hodohan* (seksi sensor) dari kantor berita tersebut. Pada bulan September berita mengenai kemerdekaan ini bisa diterima di kawasan paling terpelosok di Indonesia.<sup>35</sup>

Belanda menganggap bahwa pembentukan negara Republik Indonesia melalui proklamasi Soekarno-Hatta hanya semata-semata hasil usaha Jepang. Dan atas bantuan pihak penguasa, dengan melalui siaran Radio Soekarno telah menimbulkan kekacauan seolah-olah kemerdekaan itu diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal itu di mungkinkan karena tiada datangnya pendaratan tentara Sekutu di Indonesia.

Oleh karena itu, Belanda mendesak Laksamana Moun Batten agar memerintahkan panglima tentara Jepang untuk membubarkan proklamasi Republik

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> MC. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi, 2005), 432.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Hasyim Latif, *Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI* (Jakarta: PT. Lajnah Ta`alif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Kyai [PBNU], 1995), 48.

Indonesia dan menjamin keutuhan pemerintahan sipil. Tetapi Jepang tidak mampu berbuat apa-apa karena rakyat Indonesia lebih melumpuhkan tentara Jepang.<sup>37</sup>

kemerdekaan RI, melakukan Menyikapi Jepang segera tindakan memandulkan segala hal yang memiliki potensi bagi pihak Indonesia untuk berbalik melawan Jepang. Tindakan-tindakan itu di antaranya dengan terbitnya keputusan oleh Pemerintah Militer Jepang tentang pembubaran kesatuan Peta pada 18 agustus 1945. Tindakan ini ditunjukan untuk menghambat Indonesia menjadikan Peta menjadi satuan organisasi tentara negara. Pembubaran itu juga diikuti dengan perintah agar setiap senjata yang ada di tangan personil Peta di setiap daidan di Jawa, Madura, dan Bali diserahkan kepada markas tentara Jepang di daerah masing-masing. Dengan keluarnya keputusan ini hampir seluruh senjata Peta telah jatuh lagi ke tangan Jepang, <sup>38</sup> sehingga kesatuan yang diharapkan bisa menempatkan diri sebagai garda pertahanan negara itupun bubar dan tidak memiliki struktur komando lagi.<sup>39</sup>

Jepang mengumumkan pembubaran Peta, Heiho, dan sebagainya, sementara mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap Hizbullah (Kaikyo Seinen Teishentai). Tidak hanya Hizbullah, barisan di luar Peta seperti Barisan Pelopor (Suishintai) yang berafiliasi kepada golongan Nasionalis juga tidak mengalami pembubaran.40

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia,

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid., 186.

Karena Peta telah dibubarkan dan senjata dilucuti, para revolusioner Indonesia berupaya merebutnya kembali dari Jepang. <sup>41</sup> Cara itu dilakukan dengan baik-baik di mana Jepang dengan Sukarela menyerahkan persenjataan mereka, atau jika cara ini tidak bisa maka dengan cara merebutnya juga menjadi salah satu pilihan yang harus ditempuh. <sup>42</sup>

Aksi perebutan senjata dari Jepang terjadi tidak serentak antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perebutan senjata yang berlangsung di Surabaya relative berjalan lancar dan tidak ada benturan yang berarti antara pihak Jepang dengan pemuda revolusioner karena salah seorang perwira senior AL Jepang Laksamana Yaichiro Shibata, lebih menunjukan sikap untuk memihak Indonesia dan membukakan pintu gudang persenjataan untuk diambil alih pemuda revolusioner Surabaya. Amun tak selamanya perebutan senjata itu berlangsung mulus, bahkan sering didahului dengan kontak senjata sehingga Surabaya menjadi bergolak.

Perebutan senjata di markas pasukan Jepang di Sidoarjo, dipimpin oleh seorang perwira TKR, Mayor Kadim Prawirodirdjo, dibantu oleh para pejuang dari Hizbullah dan lainnya. Jepang tidak memberikan perlawanan dan reaksi yang berarti terhadap tindakan para pejuang dan Hizbullah Sidoarjo sehingga pengalihan persenjataan itu tidak menimbulkan korban. Sedangkan di sebelah Barat Surabaya yakni di Mojokerto, jika pada mas Jepang Hizbullah hanya berjumlah satu kompi,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ulf Sandhausen, *Politik Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 174.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 437.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 49.

menjadi bertambah banyak setelah kemerdekaan. Hizbullah Mojokerto dipimpin oleh Masnyur Solichy dan Munasir yang berhasil mengambil alih senjata Jepang dengan cara baik-baik.<sup>45</sup>

Hampir semua eksponen revolusi melakukan inisiatif mengambil alih kendali pemerintahan dan persenjataan yang ada di tangan Jepang, sehingga berbagai gejolak sosial meletus di beberapa daerah. Gabungan antara Hizbullah, mantan personil Peta dan Heiho, dan organ-organ revolusi lainnya melakukan tindakan pengambilalihan kekuasaan dari tingkat desa hingga walikota dan bupati. 46

Sikap pemerintah yang tidak segera membentuk kesatuan tentara mendorong mantan para pasukan KNIL dan Peta menginginkan agar pihak pemerintah segera membentuk sebuah garda pertahanan (tentara nasional) yang bertugas dan memiliki tanggung jawab mempertahankan kedaulatan negara terhadap kemungkinan adanya serangan yang dilakukan pihak luar yang tidak menghendaki keberadaan dan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Pembentukan tentara akhirnya dilakukan karena situasi berubah sedemikian cepat. Pendaratan pasukan Inggris yang diboncengi orang-orang Belanda ingin menguasai wilayahya eks-Hindia Belanda lagi. Keadaan ini semakin memperburuk keadaan sehingga memunculkan bentrokan-bentrokan dibergai tempat. Berangkat

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid., 178.

dari kenyataan ini maka pada bulan September 1945, Presiden Soekarno menugaskan pejabat Mentri Penerangan, Amir Syarifudin, untuk membentuk tentara nasional.<sup>48</sup>

Pada 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan dan menandatangani maklumat tentang pembentukan tentara nasional yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keesokan harinya pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengangkat eks-Shodanco Supriyadi (pemimpin pemberontakan Peta di Blitar) sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan eks-Mayor Oerip Soemahardjo sebagai kepala Staf Umum TKR.

Selain itu Kesatuan Laskar Hizbullah berdiri secara mandiri tanpa keterlibatan pemerintah mengakui terbantu dengan keberadaannya. TKR butuh waktu untuk membangun kesamaan visi misi karena anggotanya sebagian besar eks-Peta dan eks-KNIL yang telah dibubarkan, sehingga jalur komando terhenti dan tidak memiliki kendali terhadap anak buahnya di masing-masing daidan. Sedangkan Hizbullah dengan Zainul Arifin sebagai Panglimanya sudah eksis dan efektif terhadap seluruh anggota Hizbullah di Jawa, Madura, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, apalagi didukung dengan struktur NU maupun Masyumi yang sudah eksis diberbagai daerah hingga tingkat desa. <sup>50</sup>

Sebagai laskar yang telah terbentuk jauh hari sebelum kemerdekaaan, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah telah memiliki struktur dan komando hirarki yang

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ali Sastroamidjoyo, *Tonggak-Tonggak Perjalananku* (Jakarta: PT. Kinta, 1974), 182.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Notosusanto, Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 185.

telah berfungsi melalui kepunguran NU yang sudah memiliki cabang-cabang di hamper seluruh daerah, juga ormas di bawah bendera Masyumi.<sup>51</sup>

Perlengkapan dan kemampuan personil Hizbullah dalam ketrampilan kemiliteran di bawah Peta, Heiho, atau Gyugun. Peta adalah kesatuan yang dilengkapi persenjataan kemampuan untuk mempergunakannya, sementara Hizbullah bisa dikatakan tidak memegang senjata. Jika pun dalam latihan dan pendidikan kemiliteran itu menuntut untuk menggunakan peralatan dan persenjataan maka yang digunakan adalah persenjataan yang dibuat dari kayu, bukan senjata yang sebenarnya. Meskipun demikian, bukan berarti semangat juang, taktik dan keberanian laskar Hizbullah di bawah Peta, Heiho, dan Gyugun apalagi jika telah mendapatkan instruksi dari Kyai. 53

Melihat kedatangan tentara Sekutu di Jakarta dan kota-kota besar lainnya ditanah air termasuk di Surabaya. Sejumlah pimpinan politik Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk menghentikan pengambilalihan kembali Indonesia ke Belanda. Namun upaya tersebut menemui jalan buntu. Tentara Sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan menganggap masih tetap sebagai bekas jajahan Hindia Belanda.

Setelah berjuang ratusan tahun melawan kolonialisme, Indonesia dengan tegas menyatakan kemerdekaannya. setelah Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Republik Indonesia. Namun, kemerdekaan itu tidak berlangsung lama.

.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibid, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam (Sebuah Pemberontakan)* (Jakarta: Grafiti Press, 1995), 64.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Bilawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad*, 187.

Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces Netherland East Indies*) untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah perang.<sup>54</sup> Suasana berubah kearah ketegangan karena Belanda sebagai peletak dasar kolonialisme bermaksud menguasai kembali kedaulatan NKRI yang belum genap berusia satu bulan.<sup>55</sup>

Inggris sangat berharap misi AFNEI yang mereka lakukan terhadap dua pulau penting, Jawa dan Sumatera, bisa terselenggara sesuai rencana. Apa yang dilakukan Inggris dengan melakukan pendaratan pasukannya ke Indonesia, terutama ke Jawa, setelah berakhirnya Perang Dunia II.<sup>56</sup> Pendaratan kali ini Inggris menghadapi sebuah masyarakat dan bangsa yang telah memiliki kesadaran tentang arti dan hak kemerdekaan.<sup>57</sup>

Inggris menyadari bahwa yang dihadapi saat ini adalah sebagian besar rakyat sedang dibakar gelora heroik dan patriotis membela kemerdekaan. Karenanya, Inggris mempertimbangkan resiko dan masalah jika mereka tidak menempuh cara yang hatihati. Para pimpinan pasukan Inggris juga harus memperhitungkan bahwa mereka bersama Amerika Serikat di masa pendudukan Jepang telah dijadikan obyek atau pihak yang harus dihadapi serta dilawan pada saat pihak Jepang melakukan serangkaian penggalangan dalam upaya mendukung kampanye perangnya.<sup>58</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Mansyur Amin, NU & Itjihad Politik Kenegaraannya (yogyakarta: Al-Amin Press, 1994), 94.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Zainal Munasichin, *Resolusi Jihad NU Sejarah Yang di Lupakan* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2001), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibid., 197.

Pendaratan pasukan AFNEI di Jawa, pihak Inggris mendapatkan perlawanan sengit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua daerah ini para pejuang Indonesia dari berbagai kalangan baik Nasionalis, Islam, dan Sosialis lebih memilih menempuh jalan bertempur dalam menghadapi Inggris. Sikap frontal ini diambil karena mereka menilai misi AFNEI Inggris tidak semata sebagai upaya pasifikasi pasca Perang Dunia II semata, namun di balik itu Inggris juga mengupayakan untuk membuka jalan bagi pihak Belanda untuk bisa berkuasa dan menjajah kembali wilayah Indonesia. Munculnya perlawanan keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini seolah mengulangi dan menguatkan tipikal dua kawasan ini di masa lampau yang tercatat sebagai kawasan paling keras dan memiliki tradisi perlawanan terhadap unsur-unsur asing (Barat).<sup>59</sup>

Jawa Timur dan Surabaya juga sudah sejak lama dikenal sebagai basis dari kelompok Islam, terutama Islam tradisional yang tersatukan dalam organisasi NU. Di kawasan ini terserak banyak pondok pesantren dari pinggiran kota hingga ke pelosok desa dengan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Apapun ungkapan dan tindakan para kyai dijadikan sebagai teladan para santrinya telah membuat sebuah fenomena sosial yang cukup unik dan patut diperhitungkan. Terlebih dengan kultur mereka yang sudah sejak lama menjauh dan melawan terhadap sebagaian besar kepentingan Kolonial di masa lampau. 60 Secara historis, Jawa Timur dan Surabaya telah menjadi basis paling kuat kaum Islam tradisional. Di

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid., 197.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid., 199.

wilayah ini dikenal sebagai kantong utama bagi pesantren-pesantren. Surabaya merupakan *melting pot* (melebur menjadi satu) bagi para Laskar Hizbullah.<sup>61</sup>

Dan pergolakan itu menemukan titik puncaknya ketika tanggal 19 September 1945 di hotel Yamato (sekarang hotel Mojopahit) berkibar bendera Belanda yang berwarna Merah Putih Biru yang dikibarkan oleh Indo Belanda yang bermarkas di hotel yang terletak di jalan Tunjungan itu.<sup>62</sup> Pada kejadian tersebut terjadi baku tembak antara pasukan Belanda dengan para pemuda termasuk para pejuang Hizbullah Surabaya.<sup>63</sup> Berkibarnya bendera itu sangat menarik perhatian warga kota Surabaya, mereka dengan cepat menggerakan massa berteriak-teriak menuntut bendera itu diturunkan. Pada saat konflik terus berlangsung beberapa orang pemuda menaiki hotel Yamato, lalu menurunkan bendera Belanda. Mereka merobek warna birunya kemudian mereka kibarkan lagi. Masa bersorak riuh sambil meneriakan pekik merdeka.<sup>64</sup>

Para pemimpin bangsa Indonesia sadar bahwa tanah air Indonesia yang baru saja terlepas dari jajahan dari kekuasaan penjajah Jepang akan terjajah lagi. Namun semua lapisan rakyat Indonesia telah siap bertempur untuk mempertahankan negaranya yang baru saja merdeka. 65

Situasi Surabaya semakin mencekam dengan meningkatnya aktivitas pasukan Inggris menjadi pertimbangan para Kyai NU segera bertindak untuk membangkitkan

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ibid., 198.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ibid., 51.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Frederick, Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), 259.

<sup>65</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 53.

dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap Inggris. Langkah pertama yang dilakukan pengurus NU adalah dengan segera memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan NICA-Belanda yang membonceng Inggris. <sup>66</sup>

Bung Karno atas saran Jendral Soedirman mengirimkan utusan khusus kepada KH. Hasyim Asy`ari *Roisul Akbar* NU di Tebuireng Jombang untuk meminta mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI.<sup>67</sup> Menanggapi pertanyaan itu KH. Hasyim Asy`ari memberi jawaban tegas bahwa sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.

Sebagai organisasi sosial keagamaan yang sangat anti terhadap penjajahan, NU (Nahdlatul Ulama) memanggil para Konsulnya Sejawa dan Madura untuk menentukan sikap terhadap NICA. Pertemuan para konsul NU berlangsung 21-22 Oktober 1945 bertempat dikantor PBNU di Bubutan Surabaya. Maka lahirlah Resolusi Jihad. Resolusi ini menyebar, dan menjadi pegangan moral bagi badan perjuangan Islam di Jawa dan Madura. 68

Resolusi Jihad ini diserukan KH. Hasyim Asy`ari selaku pimpinan tertinggi NU. Semangat serta keberanian rakyat Indonesia untuk melawan Sekutu dan NICA membara dimana-mana. Pondok-pondok pesantren berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Para pemuda semakin siap bertempur sampai titik darah

<sup>68</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Choirul Anam, *Pertumubuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu, 1999), 129.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Munaisichin, Resolusi Jihad NU sejarah yang Dilupakan, 8.

penghabisan. Bahkan mereka bertekad lebih baik mati berkalang tanah dari pada menyerah kepada penjajah.<sup>69</sup>

Pendaratan pasukan Inggris membuat suasana semakin mencekam. Pada 25 Oktober 1945 Inggris mendaratkan sekitar 6.000 pasukannya yang tergabung dalam Brigade ke-49 dengan menggunakan kapal HMS. Weveney, Malika, Assidious. Pasukan ini dipimpin Jendral AWS. Mallaby yang melakukan pendaratan di pelabuhan Tanjung Perak.

Setelah mendengar adanya pendaratan tentara Inggris, Gubernur Suryo mengirimkan utusan untuk menemui pasukan Inggris di pebuhan Tanjung Perak, yang terdiri atas Ruslan Abdul Gani, dr. Soegiri, DR Moestopo, Bambang Sutopo dan Kastur. Wakil Inggris yang menerima putusan Gubernur Suryo adalah Kolonel Pugh dan Kapten Shaw, wakil Komandan 49 Ind.Bde. Gubernur Suryo atas nama pemerintah Indonesia meminta kepada Inggris agar menhentikan pendaratan pasukannya. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan oleh Inggris. Karena itu, pemuda Surabaya dan anggota BKR marah dan hampir saja terjadi tembak menembak. Dan kemarahan arek Suroboyo mereda karena perundingan dilakukan oleh Kolonel Pugh dengan Dr. Moestopo yang berlangsung di markas Dr. Moestopo, pertemuan melahirkan kesepakatan bahwa pasukan Inggris tidak akan bergerak melebihi jarak 800 meter dari pelabuhan Tanjung Perak.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ibid., 54.

<sup>70</sup> Ibid

Perundingan antara RI dan Inggris diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 1945. Perundingan di ikuti oleh Brigjend Mallaby beserta stafnya, dan di pihak Indonesia terdiri ats Residen Sudirman, Doel Arnowo, Walikota Radjamin Nasution dan Muhammad. Dalam perundingan ini disepakati mengenai adanya jaminan keamanan, ketertiban, dan keadilan untuk bekerja sama dengan dibentuknya sebuah "Kontak Biro".

Keputusan telah di sepakati bersama itu lalu di langgar oleh Inggris kebebasan yang di berikan pemerintah RI disalahgunakan. Mereka harus mendaratkan pasukannya sampai tanggal 27 Oktober 1945 sambil terus menyusun dan mengatur pasukannya. Beberapa tempat vital yang ada di kota Surabaya di rebut dan diduduki. Pos Polisi Bubutan dan Nyamplungan, lapangan terbang Tanjung Perak, gedung Internatio, Kantor Pos Besar, pusat oto mobil dan lain-lainnya mereka kuasai. Pada malam hari 26 Oktober 1945 mereka juga melakukan penyergapan di penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel Huiyer bersama stafnya. 71

Keadaan semakin keruh ketika pada tanggal 27 Oktober 1945 Inggris melalui Instruksi Mayjen DC. Hawtorn yang bertindak sebagai Panglima AFNEI Inggris untuk Jawa, Madura, Bali, dan Lombok dengan menggunakan pesawat menyebarkan pamflet yang ditujukan kepada penduduk Surabaya. <sup>72</sup> Isi pamlet adalah tentang penegasan terhadap kedudukan dan kekuasaan Inggris di Surabaya. Di dalamnya juga dimuat ketentuan bahwa yang boleh memegang senjata di Surabaya adalah mereka

<sup>71</sup> Ibid 55

<sup>72</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 214.

yang menjadi pasukan Inggris dan anggota polisi reguler. Di luar ketentuan ini jika ada orang yang memegang senjata, maka Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. <sup>73</sup> Selebaran tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan penduduk Surabaya.

Para pemuda Surabaya tidak mau menemui himbauan Sekutu bahwa mereka harus menyerahkan senjatanya. Bahkan mereka dengan cepat mengatur barisan untuk mengadakan perlawanan. Kontak senjata pun akhirnya tak bisa dihindari. Polisi, BKR, Hizbullah, BPRI, dan semua badan Kelaskaran segera mengadakan serangan setelah mendengar komando. Dengan berbagai macam senjata yang ada mereka menggempur pos-pos dan tempat yang telah diduduki oleh tentara Inggris.<sup>74</sup>

Dalam serbuan serentak 28-30 Oktober 1945 Inggris merasa kewalahan dan jika tidak segera bertindak untuk menghentikannya maka keadaan yang lebih buruk lagi akan menimpannya. Kalah jumlah pasukan membuat pasukan Inggris dengan mudah disapu bersih para pejuang dan penduduk Surabaya . Melihat hal ini, Jendral Mallaby segera mengontak pimpinan AFNEI di Jakarta sekaligus meminta agar mereka menghubungi pimpinan Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan harapan dapat menghentikan pertempuran yang bisa memusnahkan pasukan Inggris di Surabaya.<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Frederick, Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), 332.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 216.

Gencatan senjata dicapai oleh kedua pihak, dan perundingan dilakukan pada 30 Oktober 1945 di mana Inggris diwakili Jendral Hawtorn dan Jendral Mallaby, sementara pihak Surabaya diwakili (Gubernur Jawa Timur), Sudirman (Residen Surabaya), dengan disertai perwakilan dari badan-badan perjuangan seperti Sungkono dan Soetomo (Bung Tomo).<sup>76</sup>

Wakil Presiden Muhammad Hatta, Amir Syarifudin, dan Soetomo (Bung Tomo) juga turu berbicara di radio dengan menghimbau agar kesepakatan yang dibuat dipatuhi dan kedua belah pihak menjaga kedisiplinan dalam situasi yang masih serba tidak menentu itu.<sup>77</sup>

Setelah ketegangan mereda rombongan kontak biro meneruskan perjalanan ke Kepememstrat tetapi ketika membelok ke Jembatan Merah sekelompok pemuda menghadangnya. Kelompok dipimpin oleh seseorang yang histeris dengan membawa bendera merah putih yang warna merahnya berasal dari darah seorang tentara Inggris. Para pemuda menuntut agar tentara Inggris yang berada di gedung Internatio segera dikeluarkan. Suasana kembali terasa panas oleh kemarahan-kemarahan pemuda-pemuda itu. Para pemimpin Surabaya dalam rombongan kontak biro tak mampu menyabarkan mereka dan kontak senjata tak bisa dihindari. Dalam kontak senjata itu Brigadir Jendral Mallaby tertembak mati. 78

<sup>76</sup> Ibid., 218.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Frederick, Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), 337.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 59.

Terbunuhnya Mallaby mendapat reaksi yang hebat dari pihak Inggris, karena itu termasuk urusan yang besar. Surat Kabar seluruh dunia juga memperhatikan secara serius karena mendapat keterangan dari Inggris. Surat Kabar di London, New York, Australia, dan Washinton menulisnya dalam posisi head line. Pada tanggal 31 Oktober 1945 selaku panglima tentara Sekutu untuk Asia Tenggara Jendral Christison mengeluarkan peringatan yang bernada ancaman.

Pada tanggal 1 November 1945 dengan membawa 1500 tentara Laksamana Muda Peterson mendarat dengan diam-diam di Surabaya yang kemudian di susul oleh pasukan yang lebih besar dengan kekuatan 2400 prajurit pada tanggal 3 November 1945 pasukan ini diperkuat dengan persenjataan yang lengkap tank, panser, meriam dan senjata-senjata lain dengan dilindungi oleh pesawat terbang jenis Mosquito dan thunderbold mereka di pimpin oleh Manserg, Panglima Divisi ke-5 Infantri India.<sup>79</sup>

Bagi pihak badan perjuangan dan pemuda persiapan untuk menghadapi kemungkinan memang telah dilakukan sebelumnya. Mereka cenderung mengambil garis keras untuk bertempur menghadapi Inggris. Kecendrungan ini bisa dilihat dari materi serangkaian pidato yang disampaikan pimpinan BPRI, Bung Tomo, yang lebih mengarah kepada kesediaan seluruh badan perjuangan di Surabaya untuk mengambil pilihan bertempur. Baik Bung Tomo dan badan perjuangan tidak percaya dengan sikap Inggris yang sebelumnya melakukan perundingan karena hal itu tidak lebih

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibid., 60.

hanya sebagai taktik untuk menghindarkan diri dari kehancuran total. Begitu mereka Inggris kembali kuat maka terlihat tujuan dan ambisi mereka yang sebenarnya. <sup>80</sup>

Bung Tomo selain telah berhasil dalam mengobarkan spirit perlawanan dengan serangkaian pidatonya yang bersemangat, ia disebut memiliki hubungan khusus dengan kelompok Islam. Ia telah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari KH. Wahid Hasyim dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik.bung Tomo juga sering bertemu dengan Kyai untuk mendapatkan pesan-pesan yang kemudian digunakan sebagai bahan materi dalam serangkaian pidatonya untuk menggugah semangat berjuang. Dari beberapa Kyai, nasehat dan pesan dari KH. Hasyim Asy`ari seringkali digunakan sebagai bahan untuk menggelorakan semangat perlawanan melalui serangkaian pidatonya di corong Radio pemberontakan. Dalam pidatonya pada sore hari 9 November 1945 Bung Tomo mendorong semangat bertempur di antaranya berbunyi:

"Selogan kita tetap sama: Merdeka atau Mati. Dan kita tahu, Saudara-saudara, bahwa kemenangan akan ada di pihak kita, karena Tuhan ada di sisi yang benar. Percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan akan melindungi kita semua. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!". 82

Pada tanggal 8 November 1945 dengan nomor c-512-5, Manserg agar meminta agar Gubernur Suryo dating kekantornya pada 9 November 1945. Tetapi Gubernur Suryo tidak memenuhi undangan itu. Suryo hanya mengirimkan balasan yang berisi sanggahan terhadap tuduhan Mansergh serta member tahu Manserg

-

<sup>80</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 226.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Frederick, Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), 323.

<sup>82</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 227.

tentang persetujuan yang telah di capai oleh Presiden Soekarno dan Jendral Hawtorn. Yang mengirimkan surat gubernur Suryo adalah Residen Sudirman dan Roslan Abdul Gani dan TD Kundan. Ketiga utusan itu kembali, Manserg menyerahkan surat untuk gubernur Suryo serta sebuah surat yang berisi Ultimatum kepada bangsa Indonesia yang berada di Surabaya. Dalam Ultimatum itu Inggris meminta agar bangsa Indonesia menyerah kepada Inggris. <sup>83</sup> Dan menyerahkan senjatanya, paling lambat jam 06.00 pagi 10 November 1945.

Ultimatum ini tidak didengar oleh rakyat. Walaupun tentara Sekutu Inggris ditambah dengan Divisi India ke-5. Jumlah seluruh kekuatan tentara Sekutu dan NICA serta Goerkha sekitar 15.000 orang. Dibantu dengan senjata pemusnah meriam-meriam dari kapal penjelajah Sussek dan beberapa kapal Destroyer – perusak, serta pesawat Mosquito dan Thurderbolt dari royal Air Force Inggris. Namun, tidak mampu memadamkan semangat kemerdekaan yang sedang membara di hati rakyat.<sup>84</sup>

Di tengah *Takbir Allahu Akbar*, walaupun hanya menggenggam, Bamboe Runcing, para Ulama dan Santri maju terus pantang mundur. Mati dalam pertempuran melawan penjajah Barat, diyakini sebagai mati yang indah, gugur sebagai *Syuhada*. Bagaimanapun kekuatan senjata Imperealisme Barat, tidak mungkin mampu memadamkan semangat Ulama dan Santri yang hatinya sedang terpana oleh rasa

<sup>83</sup> Latif, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI, 61.

<sup>84</sup> Suryanegara, API Sejarah 2, 209.

cinta terhadap keagungan nilai kemerdekaan. Lebih baik gugur sebagai *Syuhada* daripada hidup terjajah.

Perang Sabil 10 November 1945, Sabtu Legi, 4 Dzulhijjah 1364, di Surabaya menampakan keagungan semangat rela berkorban harta dan keberanian jiwa yang tiada hingga para Ulama dan Santri bersama Tentara Keamanan Rakyat Surabaya berubah menjadi lautan api dan darah. <sup>85</sup> Tembakan-tembakan dari mobil lapis baja yang dimiliki pihak Republik bertempur dengan tank-tank modern pasukan Inggris. Sementara satuan tempur dari Polisi, Hizbullah, PRI, dan lainnya merangsek kearah kolone-kolone dan posisi pasukan Inggris sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak pada kedua pihak.

Dalam pertempuran tanggal 12 November 1945, pihak pejuang berhasil menembak jatuh dua pesawat tempur RAF Inggris hingga hancur bersama penumpang di dalam pesawat yang di antaranya adalah Brigadir Jendral Robert Guy Loder Simons. Referempuran Surabaya 10 November 1945, Sabtu Legi, Dzulhijjah 1364, yang menunjukan jiwa patriotik penuh keberanian dari Ulama, Santri dan Pejuang, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Referempuran Surabaya 10 November 1945, Sabtu Legi, Dzulhijjah 1364, yang menunjukan jiwa patriotik penuh keberanian dari Ulama, Santri dan Pejuang, diperingati sebagai Hari Pahlawan.

-

<sup>85</sup> Ibid., 210.

<sup>86</sup> Bilawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Survanegara, API Sejarah 2, 210.

#### B. Isi Resolusi Jihad

Di Surabaya, Bung Tomo selaku Pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), mencoba memobilisasi kekuatan rakyat dan meminta dukungan spiritual dari *Hadlratussyeikh* Hasyim Asy`ari yang saat itu sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Bung Tomo bersama beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia sowan ke pondok Pesantren Tebuireng Jombang menghadap kyai Hasyim Asy`ari menanyakan hukum melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kyai Hasyim Asy`ari kemudian menulis di atas secarik kertas tentang hukum *Jihad Fii Sabilillah* melawan Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam huruf Arab Pegon kemudian diberikan kepada Bung Tomo dan disebarluaskan ke seluruh umat Islam. Sungguh disayangkan dokumen yang sangat penting tersebut tidak diketemukan keberadaannya hingga sekarang.

Ringkas Fatwa tersebut dimuat dalam Harian *Kedaoelatan Rakjat* edisi 20 November 1945 adalah sebagai berikut.

# **FATWA JIHAD**

Hadlratusseikh Muhammad Hasyim Asy`ari, 17 September 1945.

- 1. Hoekomemnja memerangi orang kafir jang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardoe`ain bagi tiap2 orang Islam jang moengkin meskipoen orang fakir.
- 2. Hoekoemnja orang jang meninggal dalam peperangan melawan Nica serta koemplot2nja, adalah mati sjahid.
- 3. Hoekoemnja orang jang memetjahkan persatoean kita sekarang ini wajib diboenoeh.<sup>88</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Riadi Ngasiran, "Resolusi Jihad NU 'Panglima' Perang 10 November 1945", *AULA* (November 2015), 14.

Pada 21-22 Oktober 1945, para perwakilan Nadlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di Kantor Hoofdsbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan VI No. 2 Surabaya, untuk membahas situasi perjuangan dalam mepertahankan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan dipimpin KH Muhammad Hasyim Asy`ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama itu, di antaranya dihadiri KH Abdul Wahab Chasbullah (Tambak Beras Jombang), KH Bisri Syansuri (Denanyar, Jombang), KH A Wahid Hasyim (Jombang), KH M Dahlan, KH Tohir Bakri (Surabaya), KH Ridlwan Abdullah, KH Sahal Mansur, serta konsul-konsul (Utusan Cabang) NU, seperti KH Abdul Djalil Kudus, KH M Ilyas Pekalongan, KH Abdul Halim Siddiq Jember, KH Saifuddin Zuhri (Jakarta), dll.

Para ulama menunjukkan tanggung jawabnya terhadap Tanah Air dan negaranya, dengan bertekad bulat menyatakan sikap untuk mepertahankan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta. Pada akhir pertemuan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah RESOLUSI JIHAD sekaligus menguatkan Fatwa Jihad Rais Akbarnya. Dokumen tersebut dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad Surabaya. Resolusi Jihad merupakan fatwa tentang kewajiban perang melawan kaum Imperialis, dan membentuk lascar perang. Seperti Barisan Sabilillah dipimpin KH Masjuk, Barisan Hizbullah dipimpin KH Zainul Arifin, dan didirikan Markas Oelama Djawa Timoer (MODT) dipimpin KH Bisri Syansuri. Berikut naskah Resolusi Jihad yang menjadi "panglima perang" bagi semangat kaum santri.

### RESOLUSI DJIHAD FI-SABILILLAH

"Bismillahirohmanirrohim,

Rapat Besar wakil-wakil daerah (konsul-konsul) Perhimpunan NAHDLATUL ULAMA seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

# Mendengar:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakan Negara Republik Indonesia menurut Hukum Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiaptiap orang Islam.
- b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam.

## Mengingat:

- a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankannya kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum.
- b. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali menjajah di sini maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.
- c. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapatkan perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.

### Memutuskan:

- 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
- 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat 'sabilillah' untuk tegaknya Negara Republik Indonesia dan Agama Islam."

Surabaya, 22-10-1945 HB. Nahdlatul Ulama.<sup>89</sup>

<sup>39</sup> Ibid.		